

PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA

Lienly Trifosa Raranta

NPP. 29.1515

*Asdaf Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara
Program Studi Keuangan Publik*

Email: lienlytrifosa@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The local government of Minahasa Regency annually makes expenditures in order to fulfill basic public services. However, it is often not optimal, budget absorption at the beginning of the year tends to be low. Delays in budget absorption will have an impact on the implementation of programs and activities that have been planned. The success of maximum, effective and efficient budget absorption is the key in regional development for the welfare of the community. Purpose: This study aims to determine the effect of budget planning, human resource competence, and absorption of local government budgets in Minahasa Regency. Method: The research method used is a quantitative method. Respondents in the study were taken from state civil servants at the Regional Development Planning Agency (Bappelitbangda) of Minahasa Regency, where the sample used was the total sampling technique, in which all employees were used as respondents, totaling 36 people. The analytical test tool used is simple regression analysis for partial variable testing and multiple regression analysis to test the variables simultaneously. Result: The results showed, partially Budget Planning had a significant effect on Budget Absorption by 90.25% and Human Resources Competence had a significant effect on Budget Absorption by 89.11%, while simultaneously Budget Planning and Human Resources Competence had a significant effect on Budget Absorption by 96.23%. Conclusion: Budget planning and human resource competence had a significant effect on budget absorption of local government budgets in Minahasa Regency. Keywords: Budget Planning, Human Resource Competence, Regional Government Budget Absorption*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): *Pemerintah daerah Kabupaten Minahasa setiap tahunnya melakukan pengeluaran dalam rangka memenuhi pelayanan dasar masyarakat. Namun seringkali tidak optimal, penyerapan anggaran pada awal tahun cenderung rendah. Keterlambatan dalam penyerapan anggaran akan berdampak terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Keberhasilan penyerapan anggaran yang maksimal, efektif dan efisien merupakan kunci dalam pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perencanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia, dan penyerapan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Minahasa. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Responden penelitian diambil dari aparatur sipil negara pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa, dimana sampel*

yang digunakan adalah teknik total sampling, yaitu keseluruhan pegawai dijadikan sebagai responden yang berjumlah 30 orang. Alat uji analisis yang digunakan adalah analisis regresi sederhana untuk pengujian variabel secara parsial dan analisis regresi berganda untuk menguji variabel secara simultan. **Hasil/Temuan:** Secara parsial Perencanaan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran sebesar 78,49% dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran sebesar 69,88%, sedangkan secara simultan Perencanaan Anggaran dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran sebesar 98,6%. **Kesimpulan:** Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa. **Kata kunci:** Perencanaan Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi yang terjadi pada pertengahan tahun 1998 telah merambah hampir ke seluruh aspek kehidupan, menyebabkan perubahan mendasar pada sistem pemerintahan Indonesia, yakni dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Aspek pemerintahan adalah salah satu aspek reformasi yang dominan. Salah satu aspek penyelenggaraan pemerintahan yang dimaksud adalah hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adanya kebijakan desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan wujud otonomi daerah.

Semangat reformasi birokrasi dipahami sebagai penataan ulang sistem administrasi pemerintahan untuk penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang konsisten yang merupakan bagian dari pemerintahan yang baik. Akuntabilitas dicapai melalui pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawaban dilaksanakan melalui pemantauan atau pengendalian internal dan eksternal oleh masing-masing instansi pemerintah. Arah reformasi pengelolaan keuangan daerah adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan dana publik dilakukan secara transparan, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban berdasarkan *konsep value for money*, untuk menciptakan akuntabilitas publik.

Reformasi pengelolaan keuangan daerah bagi daerah terkait dikaitkan dengan perubahan mekanisme dan instrumen pengelolaan keuangan daerah, serta perubahan sumber penerimaan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pembenahan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya menitikberatkan pada kreativitas daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga penyempurnaan instrumen (*rules of the game*) dalam pengelolaan keuangan daerah juga ikut menentukan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Presiden Joko Widodo pada acara Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2020 yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), menyatakan kekecewaannya karena ratusan triliun uang Negara mengendap di kas pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah pusat sedang menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan penerimaan Negara, seperti pajak. Uang tersebut kemudian didistribusikan ke daerah dengan tujuan agar meningkatkan laju perekonomian daerah. Namun ternyata uang tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya dan hanya mengendap di kas pemerintah daerah. Uang sebanyak itu sebenarnya bisa digunakan untuk memutar roda perekonomian. Jika itu dapat dibelanjakan, maka akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat, termasuk kesejahteraan daerah tersebut. Presiden ingin agar gubernur, bupati dan

walikota bersikap tegas dan beliau tidak ingin sejumlah besar uang kembali mengendap di pemerintah daerah.

Lambatnya penyerapan anggaran menunjukkan bahwa memang beberapa institusi belum memiliki konsep perencanaan anggaran yang matang, jelas dan terukur. Minimnya konsep perencanaan penggunaan anggaran yang nyata tentu akan berdampak pada kesulitan dalam mengarahkan penggunaan anggaran yang tepat sasaran. Selain itu, lambatnya penyerapan anggaran juga akan menghambat pertumbuhan ekonomi pada daerah masing-masing.

Perencanaan anggaran yang baik dapat menghasilkan penyerapan anggaran yang maksimal. Tanpa perencanaan anggaran yang baik, penyerapan anggaran yang maksimal bisa dikatakan mustahil. Perencanaan anggaran dimulai dengan pengajuan awal yang dibuat oleh OPD dalam bentuk RKPD. Pembahasan dan penganggaran yang dilakukan dapat dilihat sebagai suatu proses yang berkelanjutan dalam tahapannya, meskipun mungkin berbeda dalam prosedur penganggaran.

Kutipan berita dari redaksi Berita Minahasa terkait arahan Bupati Minahasa adalah sebagai berikut.

Tondano, 30 Juni 2021. Jajaran Pemerintah Kabupaten (Pekab) Minahasa menggelar Rapat Kerja (Raker) dipimpin Bupati, Dr. Ir. Royke Octavian Roring, M.Si dan Wakil Bupati, Dr. (HC) Robby Dondokambey, S.Si, MM didampingi Sekretaris Daerah, Frits Muntu, S.Sos dan para Asisten Sekda masing-masing Dr. Denny Mangala, Ir. Wenny Talumewo dan Dr. Vicky Tanor. Raker tersebut digelar untuk menggenjot optimalisasi program kerja Pekab Minahasa terutama di tengah pandemi Covid-19.

Salah satu yang menjadi fokus rapat tersebut terkait capaian target vaksinasi. Di mana juga sesuai evaluasi di tingkat Provinsi Sulawesi Utara, capaian Kabupaten Minahasa belum seperti yang diharapkan.

Karenanya baik Bupati Royke Roring maupun Wakil Bupati Robby Dondokambey meminta agar aparat pemerintah terutama di kecamatan dan desa/kelurahan untuk segera mendata warga yang belum divaksinasi, mensosialisasikan kembali vaksinasi tersebut sehingga pekan mendatang akan kembali digelar vaksinasi massal di tiap desa/kelurahan sambil menyesuaikan dengan ketersediaan vaksin maupun tenaga kesehatan yang akan melayani warga.

Selain itu, turut dievaluasi sejumlah pelaksanaan program termasuk penyerapan anggaran dan pelaksanaan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada Laporan Hasil Pemeriksaan serta Kopsurgah KPK. Di mana hal-hal tersebut ditekankan kembali oleh Bupati dan Wakil Bupati untuk menjadi perhatian dan segera ditindaklanjuti oleh masing-masing OPD.

Usai rapat kerja tersebut, Bupati dan Wakil Bupati melanjutkan kegiatan dengan rapat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Rapat tersebut didahului dengan mengheningkan cipta untuk almarhum AKBP Henzly Moningkey, SIK, M.Si yang sudah mendahului menghadap Tuhan Yang Maha Kuasa.

Dalam rapat tersebut, Bupati dan Wakil Bupati memintakan pendapat dan saran dari Forkopimda yang hadir masing-masing Ketua DPRD, Glady Kandouw, SE, Kajari Minahasa, Rahmat Budiman Taufani, SH, MKn, Dandim 1302 Minahasa, Letkol Andi Sinaga, Ketua Pengadilan Negeri, Grace Nova Sasube, SH, MH serta Wakapolres, Kompol. Ahmad Sutrisno juga Ketua FKUB, Pdt. Evert Tangel, STh, MPdK dan Kepala Kantor Kementerian Agama, Dra. Sonya Mongkauw bersama tokoh-tokoh agama yang hadir. Selain itu kedua pemimpin Kabupaten Minahasa pun memintakan dukungan Forkopimda dan FKUB dalam vaksinasi massal tersebut.

"Kami mohon dapat menopang pelaksanaan vaksinasi agar mencapai target karena kami sudah menginstruksikan agar ASN, THL dan pelaku usaha bersama keluarga agar harus divaksinasi dengan memperhatikan syarat kesehatannya," kata Bupati ROR. Bupati juga meneruskan arahan-arahan Gubernur dan Wakil Gubernur termasuk terkait hajatan pengucapan syukur Minahasa Raya yang akan digelar serentak pada 26 September mendatang yang tentunya harus menerapkan protokol kesehatan.

Sumber : <http://berita.minahasa.go.id/detailpost/raker-jajaran-dan-rapat-forkopimda-bupati-wabup-minahasa-fokus-pada-capaian-target-vaksinasi> diakses Kamis, 16 September 2021

Kutipan berita yang disebutkan diatas kemudian diambil hal yang perlu untuk diperhatikan yaitu penekanan kembali Bupati dan Wakil Bupati Minahasa kepada seluruh OPD terkait pelaksanaan program termasuk penyerapan anggaran untuk menjadi perhatian dan segera ditindaklanjuti.

Perencanaan pemerintah daerah juga perlu mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang profesional, terampil dan berkompotensi tinggi. Sumber daya manusia yang berkompotensi tinggi akan menjadi aset organisasi, sekaligus mendukung daya saing organisasi di era globalisasi saat menghadapi lingkungan kerja dan kondisi sosial yang dinamis di masyarakat. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak terkecuali dalam melaksanakan setiap program kerja dan penyusunan anggaran. Selain itu, dengan adanya peraturan tertentu, pegawai yang kompeten perlu memahami peraturan tersebut, agar dapat mengambil keputusan yang tepat.

Masalah lainnya adalah kurangnya keterampilan atau kompetensi SDM yang memadai berdasarkan kualifikasinya, seperti pengadaan barang/jasa. Hal ini memaksa seorang pegawai melakukan banyak kegiatan/aktivitas yang bahkan tidak relevan dengan tugas utama mereka. Demikian juga, beberapa pegawai ada yang terpaksa untuk merangkap jabatan, beberapa bahkan tidak ditempatkan sesuai dengan pengetahuan dan keahlian mereka. Pemerintah daerah harus lebih berupaya meningkatkan kinerja pegawalnya. Oleh karena itu, pegawai yang bekerja di lingkungan pemerintah daerah harus termotivasi untuk terus meningkatkan kompetensinya. Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, diperlukan pembinaan/pelatihan yang baik. Pembinaan/pelatihan tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kualitas tenaga kerja, meningkatkan kedisiplinan, profesionalisme dan produktif untuk mencapai maksimalnya hasil kerja dalam organisasi tersebut.

Memahami fenomena belum terlaksananya penyerapan anggaran secara maksimal dengan melihat penerapan perencanaan anggaran dan kualitas sumber daya manusia yang belum mendapat perhatian serius dari Pemerintah Daerah, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa”**.

1.3 Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan Rujukan. Penelitian David Sudasri berjudul Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran (Studi Empiris pada SKPD Kota Padang) (David Sudasri, 2021), menemukan bahwa terdapat pengaruh antara perencanaan anggaran dan kompetensi sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran pada SKPD kota Padang. Berdasarkan hasil uji $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai $sig < \alpha 0,05$ yaitu $6,097 > 2,76643$ dan $sig 0,004 < \alpha 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Ini berarti model fix

digunakan untuk uji t statistik yang menguji variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Nilai *Adjusted R Square* menunjukkan 0,140. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel bebas yaitu perencanaan anggaran dan kompetensi sumber daya manusia terhadap variabel terikat yaitu penyerapan anggaran adalah sebesar 13,7%, sedangkan 86,3% ditentukan oleh faktor lain di luar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini. Dari hasil pengujian diperoleh persamaan regresi $Y = 30,444 - 0,295(X_1) + 0,292(X_2) + e$. Pada variabel perencanaan anggaran (X_1) nilai t_{hitung} adalah 2,368 dan nilai sig adalah 0,021. Hal ini dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,368 > 1,9989$ atau nilai signifikansi $0,021 < 0,05$. Nilai koefisien β dari variabel X_1 bernilai negatif yaitu 0,295. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian sehingga H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan perencanaan anggaran (X_1) berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Selanjutnya pada variabel kompetensi sumber daya manusia (X_2) nilai t hitung adalah 2,164 dan nilai sig adalah 0,034. Hal ini dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,164 > 1,9989$ atau nilai signifikansi $0,034 < 0,05$. Nilai koefisien β dari variabel X_2 bernilai positif yaitu 0,292. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini membuktikan kompetensi sumber daya manusia (X_2) berpengaruh signifikan dan positif terhadap penyerapan anggaran. Jadi hipotesis kedua dari penelitian ini diterima. Penelitian Kadek Nanik Tsania Hasni dan Basukianto yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Kadek Nanik Tsania Hasni dan Basukianto, 2021) menemukan hasil dari persamaan regresi linier berganda adalah $Y = 0,323 X_1 + 0,218 X_2 + 0,218 X_3 + 0,398 X_4 + 0,265 X_5$. Nilai *Adjusted R Square* menunjukkan 0,504. yang berarti variasi perubahan keterlambatan penyerapan anggaran dapat dijelaskan oleh variabel perencanaan anggaran dan kegiatan, proses pengadaan barang dan jasa, sumber daya manusia, regulasi dan proses pencairan dana sebesar 50,4%. Sedangkan sisanya sebanyak 49,6% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian. Selanjutnya nilai F hitung hasil regresi memberikan nilai F hitung sebesar 22,172 dengan probabilitas signifikan 0,000 kurang dari 0,05 yang berarti bahwa secara simultan variabel perencanaan anggaran dan kegiatan, proses pengadaan barang dan jasa, sumber daya manusia, regulasi dan proses pencairan dana berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Penelitian Dadan Ramdhani dan Indi Zaenur Anisa yang berjudul Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Dadan Ramdhani dan Indi Zaenur Anisa, 2022) menemukan bahwa secara parsial pada penerapan perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran menunjukkan bahwa hasil t_{hitung} diperoleh 2,593 dan t_{tabel} pada taraf = 5% $112-1 = 111-1 = 110$ adalah 1,982 maka $2,593 > 1,982$ hipotesis alternatif (H_a) diterima dengan tingkat signifikansi $0,011 < 0,05$ artinya secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran. Hasil ini mendukung hipotesis yang diajukan (**Diterima**). Hasil pengujian yang telah dilakukan secara parsial pada kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran menunjukkan bahwa hasil t_{hitung} diperoleh 7,106 dan t_{tabel} pada taraf = 5% $112-1 = 111-1 = 110$ adalah 1,982 maka $7,106 > 1,982$ hipotesis alternatif (H_a) diterima dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ artinya secara parsial kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hasil ini mendukung hipotesis yang diajukan (**Diterima**). Hasil pengujian yang telah dilakukan secara parsial pada pelaksanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran menunjukkan bahwa hasil t_{hitung} diperoleh 2,474 dan t_{tabel} pada taraf = 5% $112-1 = 111-1 = 110$ adalah 1,982 maka $2,474 > 1,982$ hipotesis alternatif (H_a) diterima dengan tingkat signifikansi $0,015 < 0,05$ artinya secara parsial ada pengaruh positif dan signifikan pelaksanaan anggaran dengan eksternal terhadap penyerapan anggaran. Hasil ini mendukung hipotesis yang diajukan (**Diterima**).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pengaruh perencanaan dan kompetensi sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran pemerintah daerah di OPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang seharusnya memiliki sasaran yang lebih tepat, metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif juga berbeda dengan penelitian David Sudasri, Kadek Nanik Tsania Hasni, maupun Dadan Ramdhani dkk. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni variabel pertama menggunakan pendapat dari Robbins dan Coulter, 2002 (Bastian, 2010) yang menjelaskan perencanaan dapat dilihat dalam tiga kategori yaitu proses, fungsi manajemen dan pengambilan keputusan. Variabel kedua menggunakan pendapat dari Hutapea dan Thoha, 2008 menjelaskan bahwa terdapat tiga komponen utama yang terdapat dalam pembentukan kompetensi yaitu pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan sikap (*attitude*). Serta variabel ketiga menggunakan pendapat dari Devas, dkk., 2000 (Halim, 2004) yang menyatakan bahwa terdapat 6 tujuan pengelolaan keuangan daerah untuk menghasilkan penyerapan anggaran yang maksimal antara lain tanggung jawab, mampu memenuhi kewajiban keuangan, kejujuran, efektif dan efisien, pengendalian dan waktu.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perencanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia, dan penyerapan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Minahasa.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif kuantitatif. Jenis data pada penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa data jumlah responden yang menjawab kuesioner dan jawaban responden atas pertanyaan kuesioner yang diukur menggunakan skala likert. Untuk sumber data menggunakan data primer.

Penelitian ini dilakukan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Total Sampling artinya semua populasi menjadi responden untuk dijadikan sumber data, yaitu berjumlah 30 pegawai Bappelitbangda. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang kemudian diolah dengan menggunakan beberapa uji statistik, yaitu (1) Uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, (2) Uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas (3) Uji hipotesis yang terdiri dari Regresi linier sederhana, Regresi linier berganda, Uji Parsial (Uji Statistik t), Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F), Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini membahas uraian analisis data-data yang diperoleh dari data primer dan sekunder penelitian. Data primer merupakan hasil kuesioner yang telah disebarkan kepada 30 orang pegawai yang terdapat pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa. Data tersebut merupakan data pokok dimana analisisnya ditunjang oleh data-data sekunder yang diperoleh dari wawancara tidak terstruktur, observasi lapangan serta dokumen-dokumen resmi untuk memperkuat hasil analisis.

3.1 Analisis Deskriptif

3.1.1 Analisis Tingkat Persetujuan dan Persepsi Responden

Apabila dilakukan analisis terhadap hasil jawaban kuesioner oleh responden dengan menggunakan skor kriterium, maka nilai maksimum apabila skor tertinggi adalah 5 adalah $5 \times 45 \text{ pernyataan} \times 30 \text{ responden} = 6.750$.

Tabel 1

Jumlah Total Skor Variabel Perencanaan Anggaran (X_1), Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_2), dan Variabel (Y) Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah

Pertanyaan	Skor					Total
	1	2	3	4	5	
A (X_1)			36	128	1280	1444
B (X_2)		2	150	396	1500	2048
C (Y)			81	368	2405	2854
Total Skor Responden		2	267	892	5185	6346

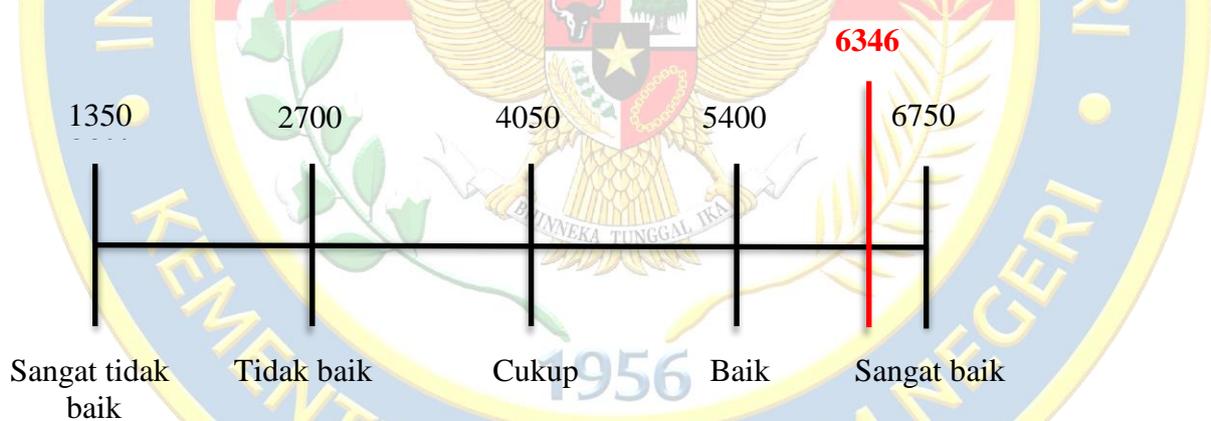
Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2022

$$\begin{aligned} \text{Persentase} &= f/n \times 100\% \\ &= (6346/6750) \times 100\% \\ &= \mathbf{94,01\%} \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel 1, total skor adalah 6346, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat persetujuan terhadap pernyataan yang tertera didalam kuesioner yang telah disebarakan adalah 6346 atau sebesar 94,01% dari kriteria yang telah ditetapkan.

Gambar 1

Skor Kriterium Skala Likert Total Skor Kuesioner



Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2022

Berdasarkan gambar 1 kita dapat melihat bahwa total jumlah skor dengan nilai 6346 berada pada kategori “sering” menuju “selalu”. Titik tersebut cenderung lebih dekat ke arah “sering”, sehingga dapat disimpulkan bahwa responden setuju dengan pernyataan kuesioner mengenai variabel Perencanaan Anggaran, variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan variabel Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah.

Jumlah total skor dengan nilai 6346 tersebut termasuk kedalam interval “baik” dan “sangat baik”, tetapi lebih mendekati “baik”. Dengan demikian diperoleh kesimpulan bahwa mayoritas responden menjawab pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa sudah baik, namun perlu ditingkatkan lagi.

3.2 Analisis Inferensial

3.2.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan tujuan menguji kesahihan tiap butir pernyataan dalam mengukur semua variabelnya. Pengujian validitas dalam dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor masing-masing pernyataan dengan skor untuk seluruh butir pertanyaan. Korelasi *product moment* merupakan teknik korelasi yang digunakan untuk menguji validitas tiap butir pernyataan.

Tabel 2

Hasil Uji Validitas Kuesioner Variabel Perencanaan Anggaran

Item Pernyataan	Koefisien Validitas (r-hitung)	Titik Kritis Validitas (r-tabel)	Keterangan
A1	0,853	0,361	Valid
A2	0,755		Valid
A3	0,833		Valid
A4	0,904		Valid
A5	0,848		Valid
A6	0,722		Valid
A7	0,618		Valid
A8	0,861		Valid
A9	0,595		Valid
A10	0,904		Valid

Sumber : Diolah Peneliti (2022) dengan SPSS 26.0

Kemudian hasil uji validitas untuk kuesioner Kompetensi Sumber Daya Manusia dapat dilihat sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3

Hasil Uji Validitas Kuesioner Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia

Item Pernyataan	Koefisien Validitas (r-hitung)	Titik Kritis Validitas (r-tabel)	Keterangan
B1	0,430	0,361	Valid
B2	0,382		Valid
B3	0,396		Valid
B4	0,483		Valid
B5	0,650		Valid
B6	0,537		Valid
B7	0,642		Valid
B8	0,400		Valid
B9	0,610		Valid
B10	0,438		Valid
B11	0,426		Valid
B13	0,427		Valid
B14	0,541		Valid
B15	0,408		Valid

Sumber : Diolah Peneliti (2022) dengan SPSS 26.0

Selanjutnya hasil uji validitas kuesioner Penyerapan Anggaran dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4

Hasil Uji Validitas Kuesioner Variabel Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah

Item Pernyataan	Koefisien Validitas (r- hitung)	Titik Kritis Validitas (r-tabel)	Keterangan
C1	0,661	0,361	Valid
C2	0,853		Valid
C3	0,539		Valid
C4	0,923		Valid
C5	0,755		Valid
C6	0,848		Valid
C7	0,842		Valid
C8	0,811		Valid
C9	0,786		Valid
C10	0,834		Valid
C11	0,683		Valid
C12	0,730		Valid
C13	0,752		Valid
C14	0,523		Valid
C15	0,834		Valid
C16	0,772		Valid
C17	0,803		Valid
C18	0,460		Valid
C19	0,684		Valid
C20	0,516		Valid

Sumber : Diolah Peneliti (2022) dengan SPSS 26.0

Dari ketiga tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai korelasi setiap pernyataan lebih besar dari r_{tabel} (0,361), sehingga menunjukkan bahwa setiap pernyataan baik variabel Perencanaan Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia, maupun variabel Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah tersebut valid dan layak digunakan pada analisis selanjutnya.

3.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu hasil penelitian relatif konsisten, sehingga apabila pengukuran diulang kembali hasil yang didapat tidak terlalu berbeda dengan hasil sebelumnya. Menurut Sarwono (2012: 86) bahwa Suatu instrumen dapat dikatakan reliable/handal apabila memiliki nilai $Alpha \geq 0,8$. Pengujian dilakukan terhadap setiap butir pernyataan yang valid dengan menggunakan *Alpha Cronbach*, hasil dari uji reliabilitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5

Hasil Uji Reabilitas

No	Variabel	Alpha Cronbach	Keterangan
1	2	3	4
1	Perencanaan Anggaran	0,919	Reliabel

1	2	3	4
2	Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,812	Reliabel
3	Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah	0,939	Reliabel

Sumber : Diolah Peneliti (2022) Dengan SPSS 26.0

3.2.3 Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan sebelum melakukan analisis regresi berganda, untuk melihat apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Data hasil kuesioner yang diperoleh merupakan data ordinal, sehingga untuk mengubahnya menjadi data interval digunakan *Method of Succesive Interval (MSI)* untuk mempermudah pengujian variabel X_1 , X_2 , dan Y .

Tabel 6

Uji Normalitas Data Penelitian

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		30	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	4.10557901	
Most Extreme Differences	Absolute	.186	
	Positive	.186	
	Negative	-.082	
Test Statistic		.186	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.010 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.231 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.220
		Upper Bound	.242

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 926214481.

Sumber : Diolah Peneliti Dengan SPSS 26.0 (2022)

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 6, hasil pengujian menyatakan H_0 diterima, karena nilai Monte Carlo Sig.(2-tailed) sebesar $0,231 > \alpha 0,05$ yang artinya data variabel Perencanaan Anggaran (X_1), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_2) dan Penyerapan Anggaran pemerintah Daerah (Y) berdistribusi normal.

3.2.4 Regresi Linear Sederhana

3.2.4.1 Regresi Linear Sederhana Variabel Perencanaan Anggaran Variabel Perencanaan Anggaran (X_1) terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah (Y)

Hubungan fungsional Perencanaan Anggaran (X_1) terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah (Y) digunakan analisis regresi linear sederhana, dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 7

Hasil Perhitungan Regresi Sederhana Variabel Perencanaan Anggaran

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
(Constant)	24.991	10.454		2.391	.024
Perencanaan Anggaran	1.457	.217	.786	6.728	.000

Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 26.0 (2022)

Berdasarkan hasil uji regresi tabel 7, maka didapatkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 24,991 + 1,457X_1$$

Konstanta (a) = 24,991 menyatakan bahwa jika Perencanaan Anggaran (X₁) tidak dilakukan maka Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah (Y) nilainya 24,991 atau akan terjadi penurunan penyerapan anggaran. Konstanta regresi (b) = 1,457X₁, menyatakan bahwa setiap kenaikan 1 satuan dari variabel Perencanaan Anggaran mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah sebesar 1,457. Kemudian Sig = 0,000 yang berarti (≤0,005) menyatakan bahwa Perencanaan Anggaran berpengaruh sangat signifikan terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah.

3.2.4.2 Regresi Linear Sederhana Variabel Kompetensi Sumber Daya (X₂) Manusia terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah (Y)

Hubungan fungsional Kompetensi Sumber Daya Manusia (X₂) terhadap Penyerapan Anggaran pemerintah Daerah (Y) digunakan analisis regresi linear sederhana, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 8

Hasil Perhitungan Regresi Sederhana Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	47.463	20.337		2.334	.027
Kompetensi Sumber Daya Manusia	.698	.297	.406	2.348	.002

(Dependent Variable: Penyerapan Anggaran)

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 26.0 (2022)

Berdasarkan hasil uji regresi tabel 8, maka didapatkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 47,463 + 0,698X_2$$

Konstanta (a) = 47,463 menyatakan bahwa jika Kompetensi Sumber Daya Manusia (X₂) diabaikan maka Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah (Y) nilainya 47,463 atau akan terjadi penurunan Penyerapan Anggaran. Konstanta regresi (b) = 0,698X₂, menyatakan bahwa setiap kenaikan 1 satuan dari variabel kompetensi sumber daya manusia mempengaruhi penyerapan anggaran pemerintah daerah sebesar 0,698. Kemudian Sig = 0,002 yang berarti (≤0,005) menyatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh sangat signifikan terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah.

3.2.5 Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah. Hasil dari uji regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9

Hasil Perhitungan Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	37.794	13.594		2.780	.001
	Perencanaan Anggaran	1.734	.287	.935	6.045	.000
	Kompetensi Sumber Daya Manusia	.382	.066	-.222	2.436	.163

(Dependent Variable: Penyerapan Anggaran)

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 26.0 (2022)

Hasil perhitungan pada tabel 9 dapat dibuat persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$\hat{Y} = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$
$$\hat{Y} = 37,794 + 1,734X_1 + 0,382X_2$$

Penjelasan dari persamaan regresi linear berganda di atas yaitu sebagai berikut:

1) Nilai Konstanta

Besarnya konstanta α adalah 37,794 yang artinya jika variabel bebas Perencanaan Anggaran (X_1) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_2) sama dengan 0, maka variabel terikat yaitu Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah nilainya 37,794.

2) Nilai Perencanaan Anggaran (X_1)

Nilai β_1 adalah 1,734 yang berarti setiap kenaikan 1 satuan variabel Perencanaan Anggaran (X_1) akan mempengaruhi variabel Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah (Y) sebesar 1,734. Koefisien regresi menunjukkan bahwa memiliki tanda positif, yang artinya semakin baik Perencanaan Anggaran, maka akan meningkatkan Penyerapan Anggaran Daerah Kabupaten Minahasa.

3) Nilai Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_2)

Nilai β_2 adalah 0,382 yang berarti setiap kenaikan 1 satuan variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_2) akan mempengaruhi variabel Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah (Y) sebesar 0,382. Koefisien regresi menunjukkan bahwa memiliki tanda positif, yang artinya semakin baik Kompetensi Sumber Daya Manusia, maka akan meningkatkan Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa.

3.2.6 Uji Parsial (Uji Statistik t)

Pengujian ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial dalam mempengaruhi variabel dependen. Variabel dependen adalah Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah, sedangkan variabel independen adalah Perencanaan Anggaran dan Kompetensi Sumber Daya Manusia. Hasil pengujian antar variabel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10
Uji t Perencanaan Anggaran (X_1) terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah (Y)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	24.991	10.454		2.391	.024
Perencanaan Anggaran	1.457	.217	.786	6.728	.000

(Dependent Variable: Penyerapan Anggaran)

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 26.0 (2022)

Berdasarkan tabel 10, maka dapat diartikan bahwa nilai t_{hitung} adalah 6,728 dengan nilai signifikansi (sig-t) 0,000. Berdasarkan hasil tersebut, memiliki arti bahwa besar t_{hitung} (6,728) > t_{tabel} (1,701) dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 sehingga hipotesis yang diperoleh adalah:

- Hipotesis H_0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa ditolak.
- Hipotesis H_a terdapat pengaruh yang signifikan dari Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa diterima.

Hasil pengujian Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11**Uji t Kompetensi Sumber Daya Manusia (X₂) terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah (Y)****Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	47.463	20.337		2.334	.027
Kompetensi Sumber Daya Manusia	.698	.297	.406	2.348	.002

(Dependent Variable: Penyerapan Anggaran)

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 26.0 (2022)

Berdasarkan tabel 11, maka dapat diartikan bahwa nilai t_{hitung} adalah 2,348 dengan nilai signifikansi (sig-t) 0,002. Berdasarkan hasil tersebut, memiliki arti bahwa besar t_{hitung} (2,348) > t_{tabel} (1,701) dengan nilai signifikansi $0,002 < 0,05$ sehingga hipotesis yang diperoleh adalah:

- Hipotesis H_0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa ditolak.
- Hipotesis H_a terdapat pengaruh yang signifikan dari Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa diterima.

3.2.7 Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Pengujian ini menunjukkan bahwa pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kompetensi Sumber Daya Manusia secara simultan terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah. Hasil perhitungan pengujian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12**Uji Statistik Signifikansi Simultan (Uji F)****ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	867.790	2	433.895	24.525	.000 ^b
	Residual	477.677	27	17.692		
	Total	1345.467	29			

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

b. Predictors: (Constant), Kompetensi Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 26.0 (2022)

Berdasarkan tabel 12, dapat diketahui bahwa nilai F adalah 24,525 dengan nilai signifikansi (sig-t) 0,000. Maka dapat diketahui F_{hitung} (24,525) > F_{tabel} (3,34) dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga hipotesis yang diperoleh adalah:

- Hipotesis H_0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari Perencanaan Anggaran dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa ditolak.
- Hipotesis H_a Terdapat pengaruh yang signifikan dari Perencanaan Anggaran dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa diterima.

3.2.8 Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi

Hubungan variabel Perencanaan Anggaran dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah dapat dilihat dari koefisien korelasi (R). Koefisien determinasi (*R-square*) merupakan koefisien yang digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel Kompetensi Sumber Daya Aparatur Keuangan dan Perencanaan Anggaran dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah.

3.2.8.1 Koefisien Korelasi dan Determinasi secara Parsial

Hasil perhitungan koefisien korelasi dan determinasi antara variabel Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13

Koefisien Korelasi Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.886 ^a	.818	.604	4.285

a. Predictors: (Constant), Perencanaan Anggaran

b. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 26.0 (2022)

Koefisien korelasi (R) berdasarkan perhitungan 0,886, artinya keeratan hubungan Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa sebesar 0,886 dan tergolong dalam kategori “sangat kuat” yang merujuk kepada teori Sugiyono. Sedangkan nilai R-square adalah 0,818 sehingga kontribusi variabel Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

$$R = r^2 \times 100\% = (0,886)^2 \times 100\% = 78,49\%$$

Koefisien determinasi sebesar 78,49% menunjukkan bahwa Perencanaan Anggaran mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pemerintah daerah sebesar 78,49%. Sedangkan sisanya Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel Perencanaan Anggaran.

Tabel 14

Koefisien Korelasi Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.836 ^a	.794	.135	6.336

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Sumber Daya Manusia

b. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 26.0 (2022)

Koefisien korelasi (R) berdasarkan perhitungan 0,836, artinya keeratan hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa sebesar 0,836 dan tergolong dalam kategori “sangat kuat” yang merujuk kepada teori Sugiyono. Sedangkan nilai R-square adalah 0,794 sehingga kontribusi variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

$$R = r^2 \times 100\% = (0,836)^2 \times 100\% = 69,88\%$$

Koefisien determinasi sebesar 69,88% menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pemerintah daerah sebesar 69,88%. Sedangkan sisanya Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia.

3.2.8.2 Koefisien Korelasi dan Determinasi secara Simultan

Hasil perhitungan koefisien korelasi dan determinasi antara variabel Perencanaan Anggaran dan Kompetensi Sumber Daya Manusia secara simultan terhadap Penyerapan Anggaran pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15
Koefisien Korelasi Perencanaan Anggaran dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.993 ^a	.945	.619	4.206

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran

b. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

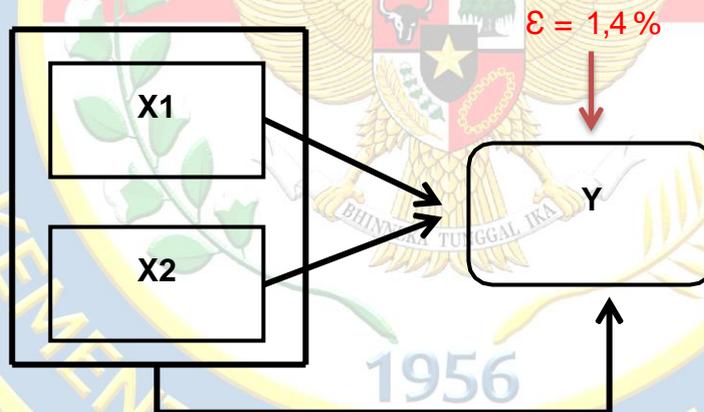
Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 26.0 (2022)

Koefisien korelasi (R) berdasarkan perhitungan 0,993, artinya keeratan hubungan Perencanaan Anggaran dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa sebesar 0,993 dan tergolong dalam kategori “sangat kuat”. Sedangkan nilai R-square adalah 0,945 sehingga kontribusi variabel Perencanaan Anggaran dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

$$R = r^2 \times 100\% = (0,993)^2 \times 100\% = 98,6\%$$

Koefisien determinasi sebesar 98,6% menunjukkan bahwa Perencanaan Anggaran dan Kompetensi Sumber Daya Manusia mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah sebesar 98,6%. Sedangkan sisanya sebesar 1,4% Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel Perencanaan Anggaran dan Kompetensi Sumber Daya Manusia.

Gambar 2
Besarnya Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah



Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2022

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Secara parsial Perencanaan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran sedangkan secara simultan Perencanaan Anggaran dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran. Dengan demikian maka Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Sama halnya dengan temuan David menemukan bahwa terdapat pengaruh antara perencanaan anggaran dan kompetensi sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran pada SKPD kota Padang.

IV. KESIMPULAN

Peneliti merangkum kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel

Perencanaan Anggaran (X_1) terhadap variabel Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah (Y) dengan $r = 0,886$ dengan uji signifikansi $t_h > t_t = 6,728 > 1,701$. Berdasarkan hasil uji regresi, maka didapatkan persamaan regresi sebagai berikut: $\hat{Y} = 24,991 + 1,457X_1$ Konstanta (a) = 24,991 menyatakan bahwa jika Perencanaan Anggaran (X_1) tidak dilakukan maka Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah (Y) nilainya 24,991. Konstanta regresi (b) = 1,457 X_1 menyatakan bahwa setiap kenaikan 1 satuan dari variabel Perencanaan Anggaran mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah sebesar 1,457. Kemudian Sig = 0,00 < 0,05 yang menyatakan bahwa Perencanaan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_2) terhadap variabel Penyerapan Anggaran pemerintah Daerah (Y) dengan $r = 0,836$ dengan uji signifikansi $t_h > t_t = 2,348 > 1,701$. Berdasarkan hasil uji regresi, maka didapatkan persamaan regresi sebagai berikut: $\hat{Y} = 47,463 + 0,698X_2$ Konstanta (a) = 47,463 menyatakan bahwa jika Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_2) tidak dilakukan maka Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah (Y) nilainya 1,172. Konstanta regresi (b) = 0,698 X_2 menyatakan bahwa setiap kenaikan 1 satuan dari variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah sebesar 0,698. Kemudian Sig = 0,002 < 0,005 yang menyatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah. Secara simultan Perencanaan Anggaran dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran Daerah Kabupaten Minahasa dengan $r = 0,993$ dan uji signifikansi $f_h > f_t$ yang dapat dilihat melalui persamaan regresi linear berganda berikut: $\hat{Y} = 37,794 + 1,734X_1 + 0,382X_2$. Penjelasan dari persamaan regresi linear berganda di atas adalah sebagai berikut:

1. Nilai Konstanta Besarnya konstanta a adalah 37,794 yang artinya jika variabel bebas Perencanaan Anggaran (X_1) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_2) sama dengan 0, maka variabel terikat yaitu Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah nilainya 37,794.
2. Nilai Perencanaan Anggaran (X_1) Nilai b1 adalah 1,734 yang berarti setiap kenaikan 1 satuan variabel Perencanaan Anggaran (X_1) akan mempengaruhi variabel Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah (Y) sebesar 1,734. Koefisien regresi menunjukkan bahwa memiliki tanda positif, yang berarti semakin baik Perencanaan Anggaran maka akan meningkatkan Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah.
3. Nilai Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_2) Nilai b2 adalah 0,382 yang berarti setiap kenaikan 1 satuan variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_2) akan mempengaruhi variabel Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah (Y) sebesar 0,382. Koefisien regresi menunjukkan bahwa memiliki tanda positif, yang berarti semakin baik Kompetensi Sumber Daya Manusia maka akan meningkatkan Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu Organisasi Perangkat Daerah saja sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Untuk penelitian selanjutnya, penulis berharap agar objek penelitian tidak terbatas hanya pada Perencanaan Anggaran dan Kompetensi Sumber Daya Manusia saja, namun dapat mengganti atau menambah variabel lainnya yang juga dapat mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah. Kemudian, peneliti selanjutnya diharapkan juga tidak hanya melakukan penelitian hanya terbatas pada lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa saja, tetapi juga dapat melakukan penelitian pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa yang dapat

menggambarkan secara umum dan luas mengenai Perencanaan Anggaran dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong, khususnya pegawai yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- . 2010. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Beritaminahasa. 2021. <http://berita.minahasa.go.id/detailpost/raker-jajaran-dan-rapat-forkopimda-bupati-wabup-minahasa-fokus-pada-capaian-target-vaksinasi> diakses Kamis, 16 September 2021.
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.
- Hasni, N. T dan Basukianto. (2021). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG*. *Telaah Manajemen*. 13: 33-44.
- Hutapea, Parulian dan Nurianna Thoha. 2008. *Kompetensi Plus Teori, Desain, Kasus, Dan Penerapan Untuk HR Dan Organisasi Yang Dinamis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ramdhani, Dadan. (2022). *PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN, KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELAKSANAAN ANGGARAN TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN*. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*. 10(1): 134-147.
- Sudasri, David. (2021). *PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN*. Padang: Universitas Negeri Padang.